



## *Kebijakan Percepatan Pembangunan Sebagai Katalisator Perdamaian Dan Keadilan Di Papua*

Oleh:

Ir. Anny Julistiani, MBA.

Plh. Direktur Penataan Daerah, Otonomi Khusus dan DPOD  
Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Kemdagri.

PADA SEMINAR  
"DINAMKA POLITIK DAN PEMBANGUNAN PAPUA"

Jakarta, 17 Desember 2012



## **OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA DAN PROVINSI PAPUA BARAT**

- **Pasal 18B ayat (1) UUD 1945:**  
*"Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan yg bersifat khusus dan bersifat istimewa yg diatur dgn Undang-Undang".*
- Pemberian **Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat** melalui pemberlakuan UU 21/2001 jo. UU 35/2008, dimaksudkan utk mewujudkan dan mendukung penyelenggaraan pemerintahan yg lebih baik, utamanya upaya mewujudkan **keadilan, penegakan supremasi hukum, penghormatan terhadap HAM, percepatan pembangunan ekonomi, peningkatan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat Papua dan Papua Barat** dalam rangka kesetaraan dan keseimbangan dengan kemajuan provinsi lain.



## EVALUASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN OTSUS PROVINSI PAPUA DAN PROVINSI PAPUA BARAT (2)

- **Pasal 78 UU 21/2001:**

*“Pelaksanaan Undang-Undang ini dievaluasi setiap tahun dan untuk pertama kalinya dilakukan pada akhir tahun ketiga sesudah Undang-Undang ini berlaku”.*
- **Aspek Kebijakan**
  - masih **belum menyelesaikan** secara keseluruhan **Perdatus dan Perdasi** sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 21 Tahun 2001, dan
  - pola serta mekanisme hubungan kerja belum terbangun secara sinergis antar Pemerintah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, DPRD dan DPRD, MRP Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, sehingga mengakibatkan **kinerja pemerintahan daerah** yang dihasilkan **belum optimal**.

2



## EVALUASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN OTSUS PROVINSI PAPUA DAN PROVINSI PAPUA BARAT (3)

- **Bidang Pendidikan**
  - terdapat peningkatan **Angka Partisipasi Sekolah (APS)** diberbagai jenjang usia pendidikan sejak tahun 2003-2011 (belum optimal dan memerlukan perbaikan dalam kualitas pendidikan berupa **ketersediaan sarana pendidikan** dan **sumber daya manusia pendidiknya**).
  - Penerapan **Program Wajib Belajar 9 (sembilan) Tahun** di Provinsi Papua dapat mencapai APS nasional lebih besar dari 70% terutama pada APS tingkat SLTP tahun 2011 sebesar 71,29%, sedangkan di Provinsi Papua Barat sebesar 88,59%. Untuk APS tingkat SLTA Provinsi Papua tahun 2011 sebesar 50,55% dapat mencapai APS nasional lebih besar dari 50%, sedangkan di Provinsi Papua Barat sebesar 65,40.

3



## EVALUASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN OTSUS PROVINSI PAPUA DAN PROVINSI PAPUA BARAT (4)

- **Angka Melek Huruf (AMH)** Provinsi Papua sejak tahun 2003-2010 masih mengalami fluktuasi tahun 2003 sebesar 74,04% dan 2010 sebesar 76,83%, sedangkan di Provinsi Papua Barat terus mengalami peningkatan tahun 2003 sebesar 92,15% dan 2010 sebesar 93,19%. Perkembangan AMH ini menandakan bahwa kondisi **Angka Buta Huruf (ABH)** terus mengalami penurunan sehingga semakin banyak masyarakat yang bisa membaca dan menulis.
- **Bidang Kesehatan**
  - **Jumlah dokter umum** di Provinsi Papua tahun 2007 sebanyak 420 orang dan tahun 2010 sebanyak 619 orang atau mengalami kenaikan sebesar 47,38%, sedangkan Provinsi Papua Barat tahun 2007 sebanyak 56 orang dan tahun 2010 sebanyak 250 orang atau mengalami kenaikan sebesar 346,42%.

4



## EVALUASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN OTSUS PROVINSI PAPUA DAN PROVINSI PAPUA BARAT (5)

- **Jumlah rumah sakit** di Provinsi Papua tahun 2007 sebanyak 12 buah dan tahun 2010 sebanyak 29 buah atau mengalami kenaikan sebesar 141,66%, sedangkan Provinsi Papua Barat tahun 2007 sebanyak 10 buah dan tahun 2010 sebanyak 14 buah atau mengalami kenaikan sebesar 40%.
- **Jumlah puskesmas** di Provinsi Papua tahun 2007 sebanyak 260 buah dan tahun 2010 sebanyak 360 buah atau mengalami kenaikan sebesar 38,46%, sedangkan di Provinsi Papua Barat tahun 2007 sebanyak 94 buah dan tahun 2010 sebanyak 126 buah atau mengalami kenaikan sebesar 34,04%.
- Namun demikian terkait **pelayanan kesehatan** masih memerlukan **perhatian khusus**, karena umumnya **tenaga kesehatan** masih terkonsentrasi di wilayah perkotaan.

5



## EVALUASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN OTSUS PROVINSI PAPUA DAN PROVINSI PAPUA BARAT (6)

- **Bidang Perekonomian**
  - **Indeks Pembangunan Manusia (IPM/Human Development Index/HDI)** Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat sejak tahun 2002-2010 terus mengalami peningkatan, tahun 2002 Provinsi Papua memiliki IPM sebesar 60,10% dan tahun 2010 sebesar 64,94% menempati urutan ke 33 secara nasional, sedangkan Provinsi Papua Barat tahun 2008 sebesar 67,95% dan tahun 2010 sebesar 69,15% menempati urutan ke 29 secara nasional. Distribusi pendapatan dapat dilihat dari rasio gini, pada tahun 2008-2010 di Provinsi Papua Barat distribusi pendapatan lebih merata dibandingkan Provinsi Papua, kondisi pada tahun 2010 rasio gini di Provinsi Papua sebesar 0,41 dan Provinsi Papua Barat sebesar 0,38.

6



## EVALUASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN OTSUS PROVINSI PAPUA DAN PROVINSI PAPUA BARAT (7)

- **Dana Otsus dan Dana Tambahan Infrastruktur**
  - Jumlah **dana otonomi khusus** dan **dana tambahan infrastruktur** yang telah diserahkan ke Provinsi Papua dan Papua Barat dari tahun ke tahun cenderung mengalami peningkatan, sejak tahun 2002-2012 untuk Provinsi Papua sebesar Rp. 28,413 T dan Provinsi Papua Barat mulai ditransfer langsung sejak tahun 2009-2012 sebesar Rp. 5,269 T
  - Alokasi dana otonomi khusus sebesar 2% dari DAU Nasional tersebut, proporsi pengalokasiannya tiap tahun dalam APBD untuk **Provinsi Papua sebesar 70%** dan untuk **Provinsi Papua Barat sebesar 30%**.
  - **Dana tambahan infrastruktur** telah dialokasikan sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2009. Jumlah dana tambahan infrastruktur untuk **Provinsi Papua sebesar Rp. 2,501 T** dan **Provinsi Papua Barat sebesar Rp. 2,298 T**, dimana hanya pada tahun 2012 mengalami penurunan.

7



## **EVALUASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN OTSUS PROVINSI PAPUA DAN PROVINSI PAPUA BARAT (8)**

- Belum adanya **Perdasus** tentang **Pembagian dan Pengelolaan Penerimaan** dalam rangka **Pelaksanaan Otonomi Khusus Papua**, sehingga **pembagian dan pengelolaan penerimaan** dimaksud hanya berdasarkan **Peraturan Gubernur**. Pengaturan pembagian besaran dana otonomi khusus yang didistribusikan pemerintah provinsi ke pemerintah kabupaten/kota belum dilakukan secara proporsional, hal ini diakibatkan karena masih banyak faktor-faktor lain yang belum dijadikan sebagai acuan atau pertimbangan oleh pemerintah, seperti: faktor **luas wilayah, jumlah penduduk, kondisi geografis, tingkat kesulitan wilayah, pendapatan asli daerah, penerimaan pajak bumi dan bangunan dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**.

8



## **EVALUASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN OTSUS PROVINSI PAPUA DAN PROVINSI PAPUA BARAT (9)**

- Kinerja dari **MRP** sebagai kelembagaan khusus masih **belum optimal**, terutama dalam **meningkatkan perlindungan hak-hak orang asli Papua** dengan berlandaskan **pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan dan pemanfaatan kerukunan hidup beragama**.

9



## **PERCEPATAN PEMBANGUNAN PROVINSI PAPUA DAN PROVINSI PAPUA BARAT (P4B)**

- Dalam rangka **mencapai tujuan pelaksanaan otonomi khusus**, maka pembangunan di Provinsi Papua dan Papua Barat perlu terus dilaksanakan dan bahkan **memerlukan percepatan** serta **peningkatan dan optimalisasi** guna **efektifitas pelaksanaan otonomi khusus**.
- Telah dibentuk **Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (UP4B)** berdasarkan **Perpres No. 66 Tahun 2011**, dengan program percepatannya berdasarkan **Perpres No. 65 Tahun 2011**.
- UP4B dibentuk untuk mendukung **koordinasi, sinergi dan sinkronisasi**, serta **mengendalikan** pelaksanaan percepatan pembangunan di Provinsi Papua dan Papua Barat, dengan **tujuan** untuk **mempercepat terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pelayanan publik**.

17



## **SASARAN RENAKSI P4B**

Sasaran akhir Rencana Aksi P4B yang merupakan keberlanjutan dari Inpres 5/2007, adalah:

1. Meningkatnya ketahanan pangan lokal melalui optimalisasi potensi bahan pangan lokal.
2. Berkurangnya kemiskinan dan meningkatnya perekonomian masyarakat melalui optimalisasi potensi sumber daya alam.
3. Terbangunnya infrastruktur dasar pembangunan terutama yang membuka keterisolasian wilayah melalui peningkatan aksesibilitas transportasi dan informasi serta layanan dasar (pendidikan, kesehatan, pemukiman, air bersih, ketenagalistrikan, telekomunikasi) di kawasan terisolir.

18



## SASARAN AKHIR RENAKSI P4B (2)

4. Terjangkaunya pendidikan yang bermutu dan relevan di kawasan terisolir.
5. Meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat di kawasan terisolir.
6. Meningkatnya perekonomian masyarakat melalui peningkatan investasi.
7. Terwujudnya kebijakan yang berpihak kepada penduduk asli Papua, golongan ekonomi kecil dan menengah, serta menuju kesetaraan dalam proses pembangunan di kawasan terisolir.
8. ***Meningkatnya keamanan dan ketertiban serta penegakkan supremasi hukum di kawasan terisolir.***
9. Meningkatnya perekonomian masyarakat melalui peningkatan investasi di kawasan terisolir.

19



## ARAH KEBIJAKAN P4B

1. Program Ketahanan Pangan;
2. Program Penanggulangan Kemiskinan;
3. Program Pengembangan Ekonomi Rakyat;
4. Program Peningkatan Pelayanan Pendidikan;
5. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan;
6. Program Pengembangan Infrastruktur Dasar;
7. Program Pemihakan Terhadap Masyarakat Asli Tanah Papua;
8. Program Penguatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan;
9. ***Program Peningkatan Keamanan dan Ketertiban;*** dan
10. Program Pengembangan Kapasitas Kelembagaan.

20



## PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN

NO	KEGIATAN	INSTANSI PELAKSANA
1	Pemetaan Masalah Sumber Konflik antara Pemerintah dengan Masyarakat	<i>Kemendagri, Kemhan, Polri dan Pemda</i>
2	Pendekatan terhadap Kelompok-Kelompok Masyarakat Tanah Papua, Dalam Rangka Membangun Kesepahaman Bidang Politik dan Budaya	<i>Kemendagri, Kemhan dan Pemda</i>
3	Penyusunan Rencana Kebijakan Politik dan Budaya	<i>Kemendagri, Kemhan dan Pemda</i>
4	Penyiapan Mekanisme Penyelesaian Bersama Masalah-Masalah Sosial-Politik dan Sosial-Budaya dalam Kerangka NKRI	<i>Kemendagri, Kemhan, Polri dan Pemda</i>

21



## PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN LINGKUP KEMENDAGRI

### Pemetaan Masalah Sumber Konflik Antara Pemerintah dengan Masyarakat

NO	OUTPUT KEGIATAN	PROGRESS PROV PAPUA	PROGRESS PROV PAPUA BARAT
1	Kerja Sama dengan Ormas/LSM/LNL Dalam Rangka Analisis Potensi Konflik sosial	<i>belum memiliki dana awal dalam pelaksanaan kegiatan</i>	
2	Kerja Sama dengan Ormas/LSM/LNL Dalam Rangka Penanganan Konflik Pemerintahan dan Keamanan	<i>belum bisa dilaksanakan karena situasi dan kondisi keamanan yang belum kondusif</i>	<i>kegiatan masih dalam proses penyelesaian seleksi administrasi terhadap proposal dari LSM/Ormas karena situasi dan kondisi keamanan yang belum kondusif</i>
3	Kerja Sama dengan Ormas/LSM/LNL Dalam Rangka Penanganan Konflik sosial	<i>kegiatan masih dalam proses penyelesaian seleksi administrasi terhadap proposal dari LSM/Ormas</i>	

22





## PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN LINGKUP KEMENDAGRI

### Pendekatan terhadap Kelompok-kelompok Masyarakat Tanah Papua, dalam rangka Membangun Kesepahaman Bidang Politik dan Budaya

NO	OUTPUT KEGIATAN	PROGRESS PROV PAPUA	PROGRESS PROV PAPUA BARAT
1	<i>Peningkatan Pemahaman kebangsaan aparatur pemerintah Prov dan Kab/Kota melalui forum dialog kebangsaan</i>	<i>belum terakomodir dalam kegiatan dan anggaran Tahun 2012.</i>	<i>terfasilitasinya rapat-rapat koordinasi dalam rangka pembentukan Pusat Pendidikan Kebangsaan dan telah dilaksanakan pada tgl 7 s/d 8 Mei 2012 di Hotel Dili Jaya</i>
2	<i>Peningkatan kualitas dan kuantitas pelaksanaan dialog kebangsaan melalui forum dialog kebangsaan yang melibatkan ormas kepemudaan, Tokoh-tokoh adat yang memiliki jaringan sampai ke tingkat daerah (Kab/Kota)</i>		<i>belum terakomodir dalam kegiatan dan anggaran tahun 2012</i>

23



## PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN LINGKUP KEMENDAGRI

### Pendekatan terhadap Kelompok-kelompok Masyarakat Tanah Papua, dalam rangka Membangun Kesepahaman Bidang Politik dan Budaya

No	OUTPUT KEGIATAN	PROGRESS PROV PAPUA	PROGRESS PROV PAPUA BARAT
3	<i>Peningkatan kualitas dan kuantitas pelaksanaan dialog kebangsaan bagi masyarakat di wilayah perbatasan melalui pelaksanaan forum dialog kebangsaan</i>	<i>belum terakomodir dalam kegiatan dan anggaran Tahun 2012.</i>	<i>belum terakomodir dalam kegiatan dan anggaran Tahun 2012.</i>
4	<i>Peningkatan pemahaman kebangsaan di kalangan pelajar tingkat SLTA dan Perguruan Tinggi Negeri/swasta</i>		
5	<i>Peningkatan pemahaman kebangsaan bagi guru dibidang pendidikan kewarganegaraan (PKN)</i>		

24



## PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN LINGKUP KEMENDAGRI

### Penyusunan Rencana Kebijakan Politik dan Budaya

No	OUTPUT KEGIATAN	PROGRESS PROV PAPUA	PROGRESS PROV PAPUA BARAT
1	<i>Terfasilitasinya Pembentukan dan Penguatan Pusat Pendidikan Kebangsaan</i>	<i>kegiatan masih dalam proses persiapan pelaksanaan</i>	<i>terfasilitasinya rapat - rapat koordinasi dalam rangka pembentukan pusat pendidikan kebangsaan, kendalanya adalah karena belum teralokasi dana APBN-P Tahun 2012</i>
2	<i>Terfasilitasinya Kelompok Kerja Demokrasi</i>	<i>kegiatan belum terlaksana karena belum teralokasi dalam dana APBN-P Tahun 2012</i>	<i>belum ada progres kegiatan</i>
3	<i>Dialog kebangsaan dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi daerah pasca konflik</i>	<i>kegiatan belum dilaksanakan, dikarenakan belum teralokasi dalam dana APBN-P Tahun 2012</i>	-

25



## PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN LINGKUP KEMENDAGRI

### Penyiapan Mekanisme Penyelesaian Bersama Masalah-Masalah Sosial-Politik dan Sosial-Budaya dalam Kerangka NKRI

No	OUTPUT KEGIATAN	PROGRESS PROV PAPUA	PROGRESS PROV PAPUA BARAT
1	<i>Pelaksanaan sosialisasi Permendagri No. 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemerintah Daerah Dalam Rangka Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila</i>		<i>kegiatan masih belum dapat dilaksanakan, kendalanya adalah belum terlaksana karena belum teralokasi dana APBN-P Tahun 2012</i>
2	<i>Tercapainya peningkatan kesadaran Bela Negara</i>		<i>kegiatan masih belum dapat dilaksanakan, kendalanya adalah karena belum teralokasi dana APBN-P Tahun 2012</i>
3	<i>Dialog kebangsaan dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi daerah pasca konflik</i>		<i>kegiatan telah selesai dilaksanakan</i>

26



## KESIMPULAN

- Setelah 11 (sebelas) tahun pelaksanaan UU No. 21 Tahun 2001, **hasilnya belum optimal, kesejahteraan masyarakat Papua belum dapat disejajarkan dengan provinsi lain di Indonesia**, disamping itu masih terjadi **konflik horizontal maupun konflik vertikal yang berkepanjangan dan dorongan dari kelompok masyarakat tertentu untuk merdeka**.
- Untuk mengatasi permasalahan yang ada di Papua dan Papua Barat saat ini, maka **PEMBANGUNAN MERUPAKAN SOLUSI PERSOALAN DI PROVINSI PAPUA DAN PAPUA BARAT**, agar dapat **mengejar ketertinggalan dan kesenjangan dari provinsi lain dan sesuai tujuan dari pelaksanaan otonomi khusus, meningkatkan taraf hidup masyarakat dan pelayanan publik di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat**.

27



## KESIMPULAN (2)

- Pembangunan tidak saja melalui pembangunan fisik, tapi yang lebih penting adalah **pembangunan sumber daya manusia**, karena pada jiwa yang sehat dan cerdas akan membawa implikasi perubahan dimasa mendatang.
- **Pemberdayaan aparatur** menjadi kunci, untuk **menatakelola pemerintahan yang baik, bebas KKN**, dan mendorong terwujudnya **inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan**.
- **Pemetaan masalah sumber konflik di Papua** harus segera dilaksanakan sebagai **langkah awal katalisator perdamaian dan keadilan di Papua**.
- **Pendekatan kepada masyarakat yang berbasis budaya** dalam kerangka NKRI, harus lebih dikedepankan dalam setiap penanganan konflik dan upaya menciptakan perdamaian serta keadilan di Papua.

28



*TERIMA KASIH*